

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daliyo, J.B.,Dkk. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta.PT. Prenhallindo.
- Febriansyah, Dkk. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesiaz(Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)*. Jawa Timur. STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Hartanto, Dadang. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. UMSU Press.
- Hart, H. L. A. (2013). *Konsep Hukum*. Bandung. Nusa Media.
- Huda, N. (2017). *Ilmu Negara*. Depok. Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kansil. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Soekamto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Solly Lubis, M. (2020). Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia. In *Enam Media*. Medan. Enam Media.
- Subardjo, H. (2018). *Bahan Ajar Teori Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta. CV Mine.
- Suryawan, I. G. B. (2020). *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi dan Wewenang DPD Secara Konstitusional*. Yogyakarta. Publika Global Media.

B. Jurnal

- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 124–128.
- Andriyani, E. E. (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 536.

- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatara Law Review*, 2(2), 242.
- Bustamin., R. J. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 224.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 5.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spectrum Hukum*, 16(1), 122.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 171–174.
- Hamja, B. (2020). Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Justisia*, 7(3), 976.
- Indah Sari, B., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan Raya dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan VVIP Maupun VIP di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 674.
- Iskandar, S., Dkk. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu. *JSH Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 20–21.
- Iskatrinah. (2020). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 22(2), 103.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 130–131.
- Kurniawan, G. P., Dkk. (2021). Analisis Permasalahan Transportasi di Perkotaan: Studi Kasus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 45.
- Muhlashin Ian. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Qadau*, 8(1), 90–94.

- Nuraini, N., & Ansori, M. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 427.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, 4(2), 40.
- Rizhan, A. (2021). Konsep Negara Hukum Profetik. *Kondifikasi*, 3(1), 84.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 16–20.
- Rumondang, R., Harahap, I., & Dalimunthe, D. (2021). Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal El-Thawalib*, 2(1), 4.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 135.
- Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 379–382.
- Syarif, M. S., & Marilang, M. (2021). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 391.
- Taufikurrahman. (2019). Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 148.
- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 115.
- Utomo, J. R., & Sudiro, A. (2022). Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil Ditinjau Dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 639.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website

JogjaPolri.go.id. (n.d.). *Visi dan Misi Kapolresta*. Retrieved April 22, 2024.

Visi dan Misi Polresta Yogyakarta. (n.d.). Retrieved March 19, 2024.